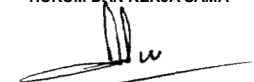









KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA

NOMOR SOP	SEK.5-HH.01.03-15
TANGGAL PEMBUATAN	Januari 2019
TANGGAL REVISI	2 Juli 2024
TANGGAL EFEKTIF	2 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM DAN KERJA SAMA  HANTOR SITUMORANG, S.Pd., M.Si 19670317 199203 1 001
NAMA SOP :	SOP Uji Konsekuensi dan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi PublikPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none">Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannyaJabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata KomputerMemiliki keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	<ol style="list-style-type: none">Komputer/LaptopAkses internetPrinter, ScannerFormulir Layanan Informasi PublikATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk data elektronik dan fisik

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Kementerian	PPID Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta usulan informasi publik yang diidentifikasi sebagai informasi rahasia (informasi yang dikecualikan)			Surat / Nota Dinas	1 hari kerja	Surat / Nota Dinas	
2	Mengumpulkan bahan informasi yang dikecualikan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja			Dasar hukum pengelolaan PPID dan Dasar hukum kearsipan	7 hari kerja	Bahan informasi yang dikecualikan	
3	Melakukan uji konsekuensi berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan atas informasi yang dikecualikan			Dasar hukum pengelolaan PPID	3 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Uji Konsekuensi - Berita Acara Uji Konsekuensi - Usulan daftar informasi yang dikecualikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan dalam rapat bersama antara PPID Kementerian dengan PPID Satuan Kerja; - Dapat dilaksanakan secara mandiri oleh PPID Satuan Kerja dengan unit teknis penghasil informasi.
4	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan			Usulan daftar informasi yang dikecualikan	2 hari kerja	SK Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
					13 hari kerja		